



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **178** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1518



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Sekretariat Daerah Kota Batam



Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan target pencapaian Visi "***terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera***", Sekretariat Daerah berupaya untuk mencapai misi-misi atas peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, Modernisasi Birokrasi, serta melakukan reformasi birokrasi baik secara individual melalui peningkatan profesionalitas serta melakukan reformasi secara kelembagaan.

Atas dasar itu, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini telah dapat disusun dengan asas mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) atas semua Kebijakan, Program dan Sasaran yang dibuat pada Sekretariat Daerah Kota Batam sehingga mampu mencapai Visi-Misi Pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Batam 2021-2026.

Selanjutnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disadari masih banyak kekurangan, sehingga kami sangat menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dikemudian hari.

Batam, Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BATAM**

H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 19681225 199802 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024 9

2.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM 9

TABEL 2. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KOTA BATAM.....21

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH25

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH 25

3.2 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024... 25

3.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 40

BAB IV PENUTUP71

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Semester 1 Tahun 2024.....	11
TABEL 2. 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Sampai dengan Triwulan II Kota Batam.....	20
TABEL 3.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	26
TABEL 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam. Rencana Kerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode tahun anggaran 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang tentunya harus menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu sesuai Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka*

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa rencana dan target capaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada dilingkungan Birokrasi dan Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Batam menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan untuk tahun 2024 berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.

Perubahan RKPD dan renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dala tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perekmebangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD, adanya penambahan kegiatan baru sebagaimana yang dimaksud apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD menajdi pedoman Perubahan renja Perangkat Daerah yang meliputi perubahan RKPD:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

- b. Target sasaran pembangunan Daerah;
- c. Prioritas pembangunan Daerah
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah

Penambahan dan pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Dalam hal penambahan program merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 703);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Nomor 127);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 232 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Setdako Batam Tahun 2021-2026. (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1100);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
12. Peraturan Wali kota Batam nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1194);
13. Peraturan Wali Kota Batam nomor 82 tahun 2023 Tentang Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam tahun 2023 Nomor 1192);
14. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1424)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan prakiraan maju Tahun 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran serta mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II: EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

Bab ini memuat tentang:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menganalisis capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah yang biasanya diukur melalui berbagai Indikator Kinerja Utama yang mencakup efektivitas, efesiensi, dan kualitas layanan yang di berikan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.2 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

3.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV: PENUTUP

berisikan tentang:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Batam. tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023.

APBD Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2023 Sebesar Rp. 244.977.314.277 terbagi menjadi 3 Program 19 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan sedangkan realisasi sebesar Rp. 192.139.508.685 dengan persentase realisasi sebesar 78.43%.

Untuk tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Batam mendapat alokasi dana sebesar Rp 257.877.793.635 dana tersebut dijabarkan dalam 3 program 19 Kegiatan dan 52 Sub kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan (Triwulan II) sebesar Rp 82.605.723.267 dengan persentase realisasi capaian 32.03%

Dalam uraian tabel di bawah, disajikan kajian ulang (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 Semester pertama dan capaian tahun (2024) semester Pertama serta prediksi capaian target Rencana Kerja di tahun 2024 Semester Pertama.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah mengacu pada hasil Laporan kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2023 dan/atau realisasi APBD tahun 2023 hingga realisasi APBD tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

TABEL 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Semester 1 Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/S UBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCAME)/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 (n- 1)			TARGET TAHUN 2024	REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN TW II TAHUN 2024		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	PERKIRAAN DAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5*100%	8	9	10= 9/8*100%	11	12	13= 12/11*100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	60-70	70	100	70-80	NA	NA	NA	NA	NA
		2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	5%	25%	25%	100%	20%	NA	NA	NA	NA	NA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi SKPD yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	0%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi Tunjangan di Lingkungan SKPD	204 Orang/Bulan	160 orang/bulan	160 orang/bulan	100%	215 Orang/Bulan	215 Orang/Bulan	100%	100%	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	22 Orang	13 Orang	13 Orang	100%	20 Orang	4 Orang	20%	20%	20%	20%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	3 Paket	42%	42%	42%	42%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%	50%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang diadakan	15 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	0%	0%	0%	0%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	245 Paket	62 Unit	62 Unit	100%	4 Paket	0 Unit	0%	0%	0%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	160 Unit	78 Unit	78 Unit	100%	9 Unit	0 Unit	0 %	0 %	0 %	0 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50 %	50%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50 %	50 %	100%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	95.74%	95.74%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	120 Unit	62 Unit	62 Unit	100%	120 Unit	120 Unit	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	78 Unit	76 Unit	92.30%	10 Unit	9 Unit	90%	90%	90%	90%
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100%	100%	100%	100%

9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	8 Paket	8 Paket	6 Paket	75%	8 Paket	6 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	8 Paket	8 Paket	7 Paket	87,50%	8 Paket	6 Paket	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Penataan Organisasi	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
		2.Persentase Jumlah PD yang memilki PMPRB berkategori Baik;										
		3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik										
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, Maturitas kelembagaan dan evaluasi tusi yang disahkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	25 %	25 %
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SOP, Probis dan Aplikasi SPBE yang diterapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Laporan	1 Laporan	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Rencana AKSI RB	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	44 Dokumen	43 Perangkat Daerah dan 1 RB	100%	100%	100%	100 %
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Evaluasi Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Pengukuran Kinerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%

11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Frekuensi Kegiatan Audiensi Kepala/ Wakil Kepala Daerah dan Persentase Tamu Kepala Daerah yang Difasilitasi	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	37 Laporan	74%	74%	74%	74%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	27 Laporan	75%	75%	75%	75%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
		2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90	60-70	70	100	70-80	50	50	50	50	50
		3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
		4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	93,33%	93,33%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	5 Dokumen	41%	41%	41%	41%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%

	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	75.26%	75.26%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta Pelatihan Topik Keagamaan dan Jumlah Toko Keagamaan yang diberikan Insentif	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	6 Dokumen	25%	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan bantuan Hibah	200 Dokumen	200 Dokumen	222 Dokumen	100%	250 Dokumen	144 Dokumen	57.6%	57.6%	57.6%	57.6%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	7 Dokumen	50 %	50 %	50 %	50 %
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1440 Keluarga	1003 Keluarga	69,65%	1068 Keluarga	416 Keluarga	39%	39%	39%	39%
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	88.10%	88.10%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Yang Disusun	410 Dokumen	410 Dokumen	215 Dokumen	88.10%	410 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Perkara yang didampingi / jumlah perkara yang masuk x 100%	8 Kasus	8 Kasus	9 Kasus	100%	8 Kasus	6 Kasus	75%	75%	75%	75%

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	410 Dokumen	757 Dokumen	100%	410 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Persentase inisiasi Kerjasama yang menjadi MOU	100	100%	66,66%	66,66%	100	50	50	50	50	50
		2. Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiaya oleh Dana CSR										
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Inisiasi MoU Kerjasama Daerah dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20 Dokumen	7 Dokumen	35%	35%	35%	35%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumn	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Frekuensi Rapat Koordinasi forum CSR	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	0%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
		2.Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	90	90	100	100	50	50	50	50	50
		3.Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	80-90	60-70	70	100	70-80	NA	NA	NA	NA	NA
		4.Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pengawasan BUMD dan BULD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Frekuensi Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%	50%	50%	50%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dengan KUR dan UMKM	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	40%	40%	40%
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	90%	90%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah buku pedoman pelaksanaan kegiatan APBD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%	0%	0%	0%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%	50%	50%	50%
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80-85	Level 4 untuk 4 Variable	NA	NA	70-75	65	87	87	87	87
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang diproses	400 Dokumen	225 Dokumen	225 Dokumen	100%	150 Dokumen	67 Dokumen	44.6%	44.6%	44.6%	44.6%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Paket yang diumumkan melalui LPSE	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	250 Dokumen	238 Dokumen	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%

	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tentang PBJ	450 Dokumen	500 Orang	500 Orang	100%	450 Orang	252 Orang	56%	56%	56%	56%
19	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dirumuskan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	40%	40%	40%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dirumuskan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	40%	40%	40%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi dan Air yang dirumuskan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	40%	40%	40%

2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pencapaian Indikator Kinerja sampai dengan TW II (sampai dengan Juni 2024) Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD Triwulan I, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (per 15 Juni 2024) Tahun 2024 dari Indikator Kinerja secara rinci sebagai berikut:

TABEL 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Sampai dengan Triwulan II Kota Batam

INDIKATOR KINERJA	SPM/ STANDART NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N+1	TAHUN N-2	TAHUN N-1	TW II TAHUN N	TAHUN N	TAHUN N+1	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	TW II 2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai LPPD				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Nilai belum di keluarkan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian				89	90	91		88.31	Nilai belum di keluarkan	90	91	
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah				70-80	70-80	80-90		89.01	70-80	70-80	80-90	
Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB				20%	15%	10%		20%	-	15%	10%	
Nilai SAKIP				B	BB	BB		B	Nilai belum di keluarkan	BB	BB	
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan				100%	100%	100%		100%	100 %	100%	100%	

Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat				70-80	70-80	80-90		87.82	70-80	70-80	80-90	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Persentase MoU yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
Persentase penerapan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Batam				90%	95%	100%		85%	80%	95%	100%	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perikanan				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	
Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan				100%	100%	100%		89.01%	-	100%	100%	
Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa				70-80	70-80	80-90		-	25	70-80	80-90	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	

2.3 ISU-SU PENTINGNYA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja Kota Batam pada periode sebelumnya (2016-2020). Dengan demikian, isu strategis dalam kategori ini dirumuskan dari permasalahan (umum) kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, geografi dan kewilayahan, sumberdaya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, kelompok isu strategis kedua adalah isu yang berasal dari pihak eksternal daerah/Kota Batam, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah daerah sekitar/tetangga, Provinsi Kepulauan Riau, nasional, maupun internasional. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kota Batam di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan), dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategi karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kota Batam. Sementara itu, tantangan pun bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja (Rencana Kerja) tahun 2025, beberapa Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Indeks reformasi birokrasi masih rendah. Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun

pengelolaan keuangan daerah masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung penyelenggaraan pemeritahan.

2. Adanya Inflasi. Inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan sistem pasar. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan, likuiditas di pasar yang berlebihan hingga proses distribusi yang tidak lancar. Penyebab inflasi adalah karena kenaikan biaya produksi. Inflasi bisa disebabkan karena biaya produksi mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah karena permintaan dan minat masyarakat terhadap suatu barang meningkat. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 Kota Batam mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang, selama periode 2016 hingga 2018, laju inflasi di Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang sebagai pembanding. Meskipun laju inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Batam, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Batam.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam melalui bagian-bagian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Walikota Batam yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean government yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Indikatif di karenakan terjadi Rasionalisasi kebutuhan di Perangkat Daerah, diantara Sub tersebut sebagai berikut

TABEL 3. 1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH				246.777.037.619	257.877.795.635	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	70-80%	70-80%	134.665.933.519	122.932.976.035	
				2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	15%	15%			
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	301.348.000	196.679.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	143.409.000	94.900.000	Pengurangan Belanja Modal

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	157.939.000	101.779.000	Pengurangan Belanja Modal
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	45.105.655.929	43.240.130.104	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	215 Orang/Bulan	45.105.655.929	43.240.130.104	Pengurangan ASN
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	258.986.000	227.295.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	20 Orang	258.986.000	227.295.000	Pengurangan Peserta Bimtek
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	20.854.251.500	20.786.674.500	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.162.918.000	3.562.668.000	Pengurangan Belanja Modal

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	7 Paket	9.046.946.000	10.477.327.500	Penambahan Belanja Konsumsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	981.000.000	654.450.000	Pengurangan Sewa Fotocopy
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.663.387.500	6.092.229.000	Pengurangan SPPD MTQ Tk Provinsi
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	100%	3.622.598.000	450.852.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0 Unit	2.405.050.000	0	Pengurangan Anggaran
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Paket	4 Paket	295.908.000	81.750.000	Pengurangan Anggaran
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	50 Unit	9 Unit	921.640.000	369.102.000	Pengurangan Belanja Modal
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	24.921.551.692	19.301.087.600	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	9.505.630.000	9.076.030.000	Pengurangan Belanja Listrik

				yang Disediakan					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12 Laporan	773.500.000	722.200.000	Pengurangan Peralatan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.642.421.692	9.502.857.600	Pengurangan Tenaga Honorer
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	25.316.412.556	25.714.994.950	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	351.760.000	351.760.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	120 Unit	16.768.503.750	16.719.707.650	Pengurangan Penyesuaian SSH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	10 Unit	10 Unit	8.196.148.806	8.643.527.300	Penambahan Pemeliharaan Lift

				asi					
8		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	5.740.127.042	6.088.583.081	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	3.955.127.042	4.303.583.081	Penambahan Gaji KDH
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang / Bulan	1.785.000.000	1.785.000.000	
9		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	4.802.845.800	4.802.845.800	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.701.484.400	2.701.484.400	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah	8 Paket	8 Paket	2.101.361.400	2.101.361.400	

		Tangga Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah	Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					
10		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	100%	2.126.602.000	1.649.313.000	
				2.Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik					
				3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik					
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	471.863.000	296.223.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	416.706.000	415.826.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	131.854.000	48.199.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	886.749.000	773.667.000	Pengurangan Sewa Ruangan

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	219.430.000	115.398.000	Pengurangan Sewa Ruang
11		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 Dokumen	100%	791.975.000	474.521.000	
				Jumlah Pendokumentasian tugas pimpinan	2 Laporan				
				Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang di fasilitasi sesuai ketentuan	100%				
		Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	598.175.000	298.275.000	Pengurangan Belanja Pakaian
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	181.450.000	175.258.000	Pengurangan Penyesuaian SSH
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	12.350.000	988.000	Pengurangan Penyesuaian SSH
II	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	100%	106.518.041.000	133.512.286.400	
				2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90	70-80			

				3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%			
				4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	100%			
1		Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	7.884.039.500	7.469.942.400	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.599.994.000	2.158.754.000	Pengurangan Pisah Sambut Forkopimda
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kecamatan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.429.500	172.968.000	Pengurangan Kegiatan Perbatasan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.263.616.000	5.327.642.400	Penambahan Belanja Konsumsi
2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	97.435.530.400	121.837.663.000	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	61.010.026.000	81.759.981.000	Penambahan Insentif Keagamaan

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	250 Dokumen	22.435.260.000	27.010.260.000	Penambahan Belanja Hibah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	11.764.327.400	12.161.208.000	Penambahan Penunjang Kegiatan MTQ Provinsi
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun	1440 Keluarga	1068 Keluarga	2.225.917.000	906.214.000	Pengurangan Keluarga peserta Fardu Kipayah

		Kelompok Masyarakat	Masyarakat	Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					
3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	371.385.000	715.031.000	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	410 Dokumen	9.815.000	9.815.000	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus	350.174.000	693.820.000	Penambahan Honorarium Beracara
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	410 Dokumen	11.396.000	11.396.000	
4		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	4.822.360.000	3.489.650.000	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	20 Dokumen	4.783.210.000	3.486.550.000	Pengurangan (penyesuaian SSH)
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000	1.550.000	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	37.600.000	1.550.000	Pengurangan Belanja Cetak
III	UNSUR SEKRETARIA DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	100%	1.597.789.200	1.432.533.200	

				Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%			
				Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	100	100			
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%	100%			
1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	555.348.000	618.108.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	95.974.000	158.734.000	Penambahan Kajian BUMD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	370.610.000	370.610.000	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	88.764.000	88.764.000	

2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	311.621.000	129.341.000	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	109.450.000	105.650.000	Pengurangan Barang Jasa
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	190.945.000	12.465.000	Pengurangan Tenaga Ahli
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	11.226.000	11.226.000	
3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	4 Level untuk 4 Variabel	80	690.535.200	647.234.200	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	150 Dokumen	20.545.000	20.545.000	Penambahan Belanja Modal
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	250 Dokumen	562.543.200	569.008.200	Penambahan Varang dan Jasa

		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	107.447.000	57.681.000	Pengurangan Barang dan Jasa
4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	40.285.000	37.850.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	14.300.000,00	13.590.000	Pengurangan Belanja Cetak
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominform, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	12.435.000	11.825.000	Pengurangan Belanja Cetak
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	13.550.000	12.435.000	Pengurangan Belanja Cetak

				dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan adalah Usulan program dan kegiatan 2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermatabat. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.

Pada tahun 2024 diusulkan 3 program 19 kegiatan dan Sub Kegiatan 52 dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp. 257.877.793.635

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 3 (tiga) program yang telah di spesifikasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dengan pelaksanaan ketiga program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam dan dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Batam

Dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, usulan lengkap tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	1 Laporan	100 %	101.779.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	95.675.800,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								43.240.130.104 ,00					51.562.239.785,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	215 Orang/bulan	100 %	43.240.130.104 ,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/bulan	51.123.952.109,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								227.295.000 ,00					1.649.768.756,00
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	20 Orang	100 %	227.295.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	861.258.756,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20.786.674.500 ,00					16.732.950.093,00

4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	7 Paket	100 %	3.562.668.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.480.865.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	7 Paket	100 %	10.477.327.500 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	4.210.313.057,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan daan yang Disediak an	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	3 Paket	100 %	654.450.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	1 Paket	782.867.536,00

						Sekretariat Daerah												
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	12 Laporan	100 %	6.092.229.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.258.904.500,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							450.852.000 ,00						9.491.294.921,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	4 Paket	100 %	81.750.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	1.549.222.861,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	9 Unit	100 %	369.102.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	5.709.650.209,00

						Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	yang Disediak an	Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana										
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19.301.087.600,00						28.581.182.941,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	9.076.030.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.244.295.619,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	722.200.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.380.598.670,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	9.502.857.600 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.956.288.652,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.714.994.950 ,00					25.706.905.556,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	6 Unit	100 %	351.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	351.760.000,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasi	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	- Kota Batam, Semua Kecamatan,	15 % 70-80 %	120 Unit	100 %	16.719.707.650 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	120 Unit	16.098.251.750,00

						Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	onal atau Lapanga n yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Semua Kel/Desa							atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a		
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	10 Unit	100 %	8.643.527.300 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	10 Unit	9.256.893.806,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							6.088.583.081 ,00						6.281.014.862,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjang an Kepala Daerah dan	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Orang/Bula n	100 %	4.303.583.081 ,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bul an	3.947.409.177,00

						Daerah	Wakil Kepala Daerah	ketentuan										
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Meneri ma Dana Penunja ng Operasi onal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Orang/Bula n	100 %	1.785.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bul an	2.333.605.685,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							4.802.845.800,00						4.661.997.212,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Kebutuh an Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediak an	Persentase Kegiatan Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	8 Paket	100 %	2.701.484.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.652.383.777,00
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	8 Paket	100 %	2.101.361.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.009.613.435,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							1.649.313.000 ,00						2.637.930.600,00
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Pengelolan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	4 Dokumen	100 % 100 % 100 %	296.223.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaa n dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	710.891.100,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	3 Laporan	100 % 100 % 100 %	415.826.00,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	651.410.600,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	44 Dokumen	100 % 100 % 100 %	48.199.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	195.211.600,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring,	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	773.667.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia	1 Dokumen	788.694.100,00

						Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Evaluasi dan Pengan- dalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	Kel/Desa							n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	115.398.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	291.723.200,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								474.521.000 ,00					2.641.289.807,00
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	50 Laporan	100 %	298.275.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	2.016.440.000,00

						Administrasi Umum Sekretariat Daerah												
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	36 Laporan	100 %	175.258.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	500.421.807,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pendok umentasian Tugas Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Laporan	100 %	988.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pendokume ntasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	124.428.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								133.512.286.400,00					97.222.466.954,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								7.469.942.400 ,00					7.559.986.635,00
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
						Persentase MoU yang	Jumlah Dokume	Persentase Penyampaian	- Kota Batam,	100 % 70-80 %	12 Dokumen	100 %	1.969.332.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Jumlah Dokumen	12	2.933.353.824,00

						ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	n Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %				(PAD)		Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	172.968.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya	1 Dokumen	850.703.377,00

						Produk Hukum yang Ditetapkan												
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.327.642.400 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	3.775.929.434,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							121.837.663.000 ,00						83.862.031.363,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	24 Dokumen	100 %	81.759.981.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	43.436.051.937,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	250 Dokumen	100 %	27.010.260.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	200 Dokumen	23.287.155.000,00

						tata pemerintah an yang ditindaklanj uti	Sosial, Transmi grasi, Kesehat an, Pember dayaan Peremp uan dan Perlindu ngan Anak, Adminis trasi Kepend udukan Dan Pencata tan Sipil, Pember dayaan Masyara kat dan Desa, Penge dalian Pendud uk dan KB									Kesehatan, Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak, Administrasi Kependudu kan Dan Pencatatan Sipil, Pemberday aan Masyarakat dan Desa, Pengendalia n Penduduk dan KB		
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	14 Dokumen	100 %	12.161.208.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14.750.668.426,00
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1068 Keluarga	100 %	906.214.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	2.388.156.000,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								715.031.000 ,00					595.625.099,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi kan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	410 Dokumen	100 %	9.815.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	1.749.436,00

						Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti												
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasikan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	8 Kasus	100 %	693.820.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	8 Kasus	591.817.993,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	410 Dokumen	100 %	11.396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	2.057.670,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								3.489.650.000 ,00					5.204.823.857,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	3.486.550.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	4.783.434.000,00

						an yang ditindaklanj uti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan												
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri								1.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	322.144.092,00
						Persentase MoU yang ditindaklanj uti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahtera an Rakyat Persentase rekomendas i kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklanj uti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	1.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	322.144.092,00
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	1.550.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	99.245.765,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1.432.533.200 ,00					2.998.298.044,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								618.108.000 ,00					776.167.752,00
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	6 Dokumen	100 %	158.734.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	213.232.331,00

						persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	aan BUMD dan BLUD											
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	4 Laporan	100 %	370.610.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	519.750.240,00

4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian dan Persentase rekomendasi i layanan kebijakan administrasi pembangunan persentase rekomendasi i kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	5 Dokumen	100 %	88.764.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	43.185.181,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							129.341.000 ,00						363.972.322,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													

						Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	105.650.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	109.755.000,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													

						Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	12.465.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	190.800.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													

						Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengelol aan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	2 Laporan	100 %	11.226.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	63.417.322,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								647.234.200 ,00					1.783.925.248,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													

						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	150 Dokumen	75-80 %	20.545.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	139.382.819,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	250 Dokumen	75-80	569.008.200 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	1.327.200.346,00

						an indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti												
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 100 %	450 Orang	75-80	57.681.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	317.342.083,00

4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						37.850.000 ,00						74.232.722,00
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan												
					indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	13.590.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	23.548.515,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup												

						indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	11.825.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	25.463.620,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
						indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	12.435.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,	5 Dokumen	25.220.587,00

						ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
TOTAL												257.877.795.635 ,00						250.416.925.492,00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi misi Wali Kota Batam. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan.
 - a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
 - b. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
 - c. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024

- b. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2024.
- c. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 diwajibkan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi program kegiatan pada tahun 2024, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui langkah-langkah/solusi yang tepat untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

3. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dipengaruhi juga oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024

diharapkan dapat dijadikan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 470671, 462217 Fax. (0778) 461813
<http://www.batamkota.go.id>
B A T A M

Kode Pos : 294641

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
Nomor : KPTS. 425 /SETDA-PAB/

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam dimungkinkan apabila terjadi perubahan kebijakan pemerintah, pergeseran anggaran pagu kegiatan dan perubahan target kinerja sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2023 agar proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah, terukur, dan tepat waktu sesuai dengan jadwal, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Batam selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024, untuk:
1. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
 2. Menyusun dan menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
 3. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;

4. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
5. Menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;

- KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : /SETDA-PAB/PK
TANGGAL :
TENTANG :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Batam	PENGARAH
2	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam	PENANGGUNGJAWAB
3	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam	SEKRETARIS
4	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
7	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
19	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
10	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
11	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
12	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
13	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
14	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Batam	Anggota
15	Seluruh Fungsional / Pelaksana Umum Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam	Kesekretariatan

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025**

**NOMOR : /SETDA-PAB/
TANGGAL :**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024**

1. Pengarah
Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
2. Penanggungjawab
 - a. Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - b. Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - c. Memberikan kebijakan pelaksanaan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
3. Sekretaris
 - a. Menyusun jadwal tahapan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - b. Mengkoordinasikan anggota dalam penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - c. Membina dan memberikan arahan terhadap anggota pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - d. Mendistribusikan dan membagi tugas kepada anggota dalam menyelenggarakan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - e. Mengarahkan dalam perumusan laporan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - f. Memberikan fasilitasi dan dukungan pelaksanaan ketatausahaan anggota dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - g. Memfasilitasi tugas keanggotaan sesuai dengan kebijakan Ketua Pelaksana.
 - h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pelaksana.
4. Anggota
 - a. Menyusun Hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - b. Mengkaji dan menyusun Hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
 - c. Melaksanakan Konsultasi dengan pimpinan unit kerja dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

5. Kesekretariatan

- a. Merumuskan pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
- b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Mempersiapkan sarana prasarana dan mengumpulkan bahan atau materi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
- d. Melakukan registrasi peserta pada waktu pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

